



# **RENJA 2021**

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI SULAWESI BARAT**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. K.H. Abd. Malik Pattana Endeng Komp. Kantor Gubernur Sulbar Telp/Fax (0426) 2325127  
Gedung II Sayap Kanan Lt. 1 Rangas Mamuju 91512

---

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**PROVINSI SULAWESI BARAT**

**NOMOR :**

**TENTANG**

**PENGESAHAN RENCANA KERJA (RENJA)**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2021**

**KEPALA BADAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dipandang perlu menetapkan Pengesahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5

tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah provinsi Sulawesi Barat Nomor 5);

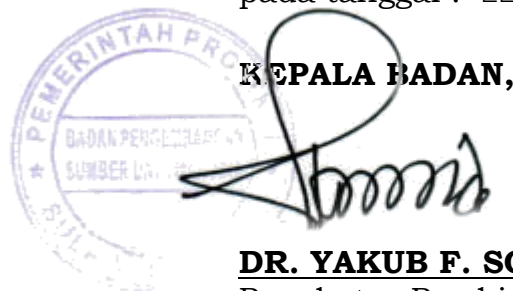
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 79);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8 tahun 201);
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021;
- KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat selanjutnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan maupun kekhilafan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal : 22 Juli 2020

**KEPALA BADAN,**



**DR. YAKUB F. SOLON, SH, M.Pd**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP. 19651005 198812 1 002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021.

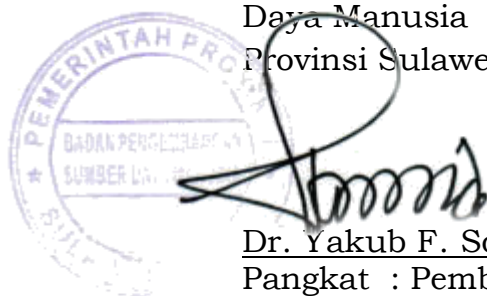
Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Rancangan Rencana Kerja ini merupakan gambaran arah dan tujuan awal dari proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan pelayanan publik Perangkat Daerah tahun 2021.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberi masukan terhadap penyusunan Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021. Dalam rangka mencapai kesempurnaan dalam penyusunan Rencana Kerja ini, kami membuka pintu untuk menerima saran dan masukan menuju arah yang lebih baik.

Semoga segala daya dan upaya yang kita lakukan senantiasa mendapatkan perlindungan dan ridha Allah SWT.

Mamuju, 22 Juli 2020

Kepala Badan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia  
Provinsi Sulawesi Barat,



Dr. Yakub F. Solon, SH, M.Pd  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP. 19651005 198812 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BABI : PENDAHULUAN .....	1
I.1. Latar Belakang .....	1
I.2. Landasan Hukum .....	2
I.3. Maksud dan Tujuan .....	5
I.4. Sistematika Penulisan .....	6
BABII : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU .....	7
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.	7
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	12
II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	13
II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	16
II.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	24
BABIII : TUJUAN DAN SASARAN .....	25
III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	25
III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	29
III.3. Program dan Kegiatan .....	30
BABIV : PENUTUP .....	58

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Secara hierarki penyusunan rencana kerja PD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Sejalan dengan dasar pemikiran di atas maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat sebagai Perangkat Daerah pada tahun 2020 menyusun Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021. Renja PD merupakan dokumen Rencana Pembangunan PD jangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh PD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kepala Daerah, yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2022 yaitu :

***“Sulawesi Barat Maju dan Malaqbiq”.***

Adapun penjelasan makna dari pernyataan Visi tersebut, adalah : **Sulawesi Barat Maju** : Komitmen untuk menjadikan Provinsi Sulawesi Barat yang sejajar dengan Provinsi lainnya yang didukung oleh konektivitas wilayah dan daya saing yang tinggi serta berorientasi pada lingkungan.

**Sulawesi Barat Malaqbiq** : Komitmen untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik berdasarkan kearifan lokal dengan dukungan masyarakat yang yang berpengetahuan, berketerampilan, berbudaya dan religius.

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022 yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020 dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2020.

## **I.2 Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020, payung hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan antara lain:



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

- Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51);
  16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 08 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 49);
  17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 08 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017;
  18. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Teknis Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;

19. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;

### **I.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renja PD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat adalah:

1. Sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan anggaran tahun 2021;
2. Sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021;
3. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya;
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Renja PD ditahun selanjutnya.

Adapun tujuan dari Renja PD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat adalah;

1. Tercapainya tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Terlaksananya program dan kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat di tahun 2021;
3. Meningkatnya capaian target program dan kegiatan tahun 2021.

### **I.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Dokumen Rancangan Renja PD Tahun Anggaran 2020, mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dengan sistematika sebagai berikut :

## **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

## **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal PD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## **BAB III. TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3. Program dan Kegiatan

## **BAB IV. PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU**

#### **II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra**

Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pelaksanaan Renja PD dikaitkan juga dengan pencapaian target Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022, berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan yang telah ditetapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat. Berikut ini disajikan Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019 dan Tahun 2020 (Triwulan I) Provinsi Sulawesi Barat pada tabel II.1.

**Tabel II.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD Tahun 2019  
Provinsi Sulawesi Barat**

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2019 (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2020 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun Berjalan			
					Target RKPD Tahun 2019 (tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2019 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2020 (%)		
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11		
	<b>Usuran Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>											
20	15											
	Badan Pengembangan SDM											
20	15	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Kebutuhan administrasi Perkantoran dan Pelayanan Birokrasi	12.541.000.000	2.039.613.461	1.940.054.300	1.880.379.308	96,92	2.115.749.300	359.761.945	2,87
20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	3.277.000.000	354.337.000	536.750.000	536.433.000	99,94	413.700.000	42.890.000	1,31
20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah jenis tagihan rekening/kwitansi	1.349.000.000	167.897.854	221.710.300	174.253.526	78,60	153.537.400	50.664.419	3,76
20	01	05	Penyedia Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Jaminan Barang Milik Daerah	153.000.000	24.500.000	25.500.000	25.488.775	99,96	-	-	-
20	01	06	Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan perijinan Kendaraan	1.193.000.000	126.852.760	195.144.000	193.585.712	99,20	219.930.000	34.847.118	2,92
20	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan Kantor yang diperbaiki	183.000.000	13.478.000	30.000.000	30.000.000	100,00	42.540.000	22.380.000	12,23
20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	415.000.000	-	0	0	#DIV/0!	86.863.000	10.341.800	2,49
20	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	342.000.000	243.810.000	56.000.000	56.000.000	100,00	53.510.000	-	-
20	01	13	Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di beli	1.209.000.000	43.160.000	198.000.000	188.350.000	95,13	196.530.000	-	-
20	01	14	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat rumah tangga yang di beli	24.000.000	3.910.000	3.930.000	3.829.000	97,43	2.845.000	-	-
20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-	223.000.000	38.780.000	36.840.000	36.775.000	99,82	88.290.000	-	-

				undangan								
20	01	17	Penyediaan Makan dan Minum	Jumlah ASN dan Non ASN	433.000.000	65.019.000	71.180.000	71.099.000	99,89	65.240.000	21.255.000	4,91
20	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah ASN Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah yang diikuti	1.618.000.000	246.479.521	265.000.000	264.662.295	99,87	421.601.000	131.380.608	8,12
	01	22	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah ASN dan Non ASN Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah yang diikuti	1.832.000.000	186.726.000	300.000.000	299.903.000	99,97	251.375.000	46.003.000	2,51
20	01	22	Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi	Jumlah Peserta	200.000.000	200.000.000	0	-	#DIV/0!	119.787.900	-	-
2	01	50	Penyediaan Alat Kebersihan Kantor	Jumlah alat pembersih	43.000.000						2.564.000	5,96
20	15	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan Kelancaran Tugas-Tugas Kedinasan	74.990.000.000	199.800.000	158.740.000	128.920.000	81,21	687.025.000	537.000.000,00	0,72
2	02	04	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah Mobil jabatan yang diadakan	250.000.000	-		-		687.025.000,00	537.000.000,00	214,80
20	02	07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Operasional yang diadakan	900.000.000	0	158.740.000	128.920.000	81,21			-
20	02	07	Pemeliharaan Rutin gedung kantor	Jumlah Bangunan yang di pelihara	300.000.000	199.800.000	0	-	#DIV/0!	-	-	-
20	15	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	642.000.000	103.500.000	99.390.000	98.550.000	99,15	160.025.000	-	-
20	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pasang Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	179.000.000	46.450.000	46.300.000	46.300.000	100,00	50.775.000,00	-	-
20	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	95.000.000	57.050.000	53.090.000	52.250.000	98,42	74.725.000,00	-	-
2	03	09	Pengadaan Pakaian Adat/Kedaerahan	Jumlah Pasang Pakaian adat/kedaerahan	50.000.000	-	-	-	#DIV/0!	34.525.000,00	-	-
20	15	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Proporsi ASN yang mengikuti Diklat Peningkatan Kapasitas	15.587.000.000	723.854.500	1.068.185.000	1.044.574.800	97,79	967.658.800	49.078.400	0,31
20	05	01	Diklat Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah	Jumlah ASN Peserta Diklat	462.000.000	0	220.140.000	218.430.000	99,22	-	-	-
20	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	1.252.000.000	174.745.700	205.000.000	199.563.300	97,35	401.399.000,00	49.078.400,00	3,92
20	05	01	Diklat Bendahara Keuangan Daerah	Jumlah ASN Peserta Diklat	462.000.000	0	220.140.000	218.695.000	99,34	-	-	-

20	05	01	Diklat Dasar satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah ASN Peserta Diklat	886.000.000	0	422.905.000	407.886.500	96,45	-	-	-
20	05	01	Diklat Penyusunan Renja OPD	Jumlah ASN Peserta Diklat	1.485.000.000	274.554.400	0	-	#DIV/0!	-	-	-
20	05	01	Diklat Pengembangan Kapasitas Camat dan Lurah/Kepala Desa	Jumlah ASN Peserta Diklat	578.000.000	274.554.400	0	-	#DIV/0!	-	-	-
2	05	71	Diklat Sertifikasi Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	960.000.000					286.629.900,00	-	-
2	05	96	Diklat Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan	Jumlah ASN Peserta Diklat	1.462.000.000					279.629.900,00	-	-
20	15	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	345.000.000	28.270.000	32.950.000	32.942.000	99,98	-	-	-
20	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan	37.000.000	10.540.000	6.520.000	6.516.000	99,94	-	-	-
20	06	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan	31.000.000	2.340.000	5.020.000	5.016.000	99,92	-	-	-
20	06	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan	31.000.000	2.340.000	5.020.000	5.020.000	100,00	-	-	-
20	06	06	Penyusunan RKA/DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Laporan	31.000.000	4.350.000	5.350.000	5.350.000	100,00	-	-	-
20	06	16	Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD	Jumlah Dokumen Laporan	31.000.000	4.350.000	6.020.000	6.020.000	100,00	-	-	-
20	06	26	Penyusunan Rentra/Renja/Lakip dan LPPD	Jumlah Dokumen Laporan	31.000.000	4.350.000	5.020.000	5.020.000	100,00	-	-	-
20	15	78	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Proporsi ASN yang memperoleh pembinaan dan Pengembangan	17.972.000.000	747.154.387	3.012.184.700	2.810.331.564	93,30	1.170.963.200	-	-
20	78	66	Diklat Kepemimpinan (DIKLATPIM)	Jumlah Peserta	9.127.000.000	155.334.000	1.326.916.200	1.262.738.200	95,16	1.170.963.200,00	-	-
	78	81	Peningkatan Kompetensi Sosial Kultural	Jumlah Peserta	740.000.000	99.395.008	139.980.000	137.286.000	98,08	-	-	-
20	78	66	Diklat Fungsional Pejabat Pengawas urusan Pemerintah Daerah (P2UPD)	Jumlah Peserta	1.173.000.000	0	291.574.500	274.420.003	94,12	-	-	-
20	78	84	Diklat Revolusi Mental bagi ASN	Jumlah Peserta Pelatihan	682.000.000	0	205.916.000	190.537.500	92,53	-	-	-
	78	81	Diklat Training Officer Course (TOC)	Jumlah Peserta Diklat	852.000.000	0	257.581.000	190.043.800	73,78	-	-	-
20	78	97	Kerjasama Lembaga Kependidikan Formal dan Kepamong Prajaan	Jumlah Dokumen	351.000.000	147.155.389	57.000.000	56.991.000	99,98	-	-	-
20	78	84	Diklat Pengembangan Widyaiswara	Jumlah Tenaga Widyaiswara yang mengikuti diklat	762.000.000	137.522.000	215.000.000	199.569.374	92,82	344.181.000,00	-	-
2	17	33	Diklat Dasar Bagi CPNS	Jumlah Peserta	998.000.000					1.392.765.900,00	-	-
2	17	43	Melaksanakan Uji Kompetensi Bagi ASN	Jumlah Peserta Pelatihan	370.000.000					260.939.900,00	-	-



2	17	65	Peningkatan Kapasitas LSP - PDN se-Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Peserta Diklat	550.000.000					796.034.900,00	-	-
	78	81	Pembentukan Tim Asesor	Jumlah Peraturan Gubernur	391.000.000	77.841.990	185.748.000	172.230.200	92,72	-	-	-
20	78	97	Pembentukan LPS-Pemda	Jumlah Peraturan Gubernur	1.087.000.000	0	157.226.000	151.272.487	96,21	-	-	-
20	78	84	Pembuatan Perencanaan (Master Plan) BPSDM	Jumlah Dokumen Perencanaan	1.000.000.000	0	0	-	#DIV/0!	-	-	-
20	78	97	Study Banding/magang	Jumlah ASN yang mengikuti Magang	368.000.000	0	175.243.000	175.243.000	100,00	-	-	-
	78	81	Monev Pelaksanaan Kediklatan Kabupaten Se Sulawesi Barat	Jumlah Kabupaten	420.000.000	129.906.000	0	-	#DIV/0!	-	-	-
<b>TOTAL</b>						<b>2.365.864.550</b>	<b>6.311.504.000</b>	<b>5.995.697.672</b>	<b>95,00</b>	<b>2.591.873.300</b>	<b>68.140.057,50</b>	<b>1,13</b>

## II.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79); dan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas pokok, membantu Kepala Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah pada bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 16 Tahun 2016, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan Kebijakan Teknis, rencana, dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur;
- b. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- e. Pelaksanaan Administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi ;
- f. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Gubernur;

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi diatas untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat, ada beberapa indikator kinerja guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut :

1. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Provinsi Sulawesi Barat;
2. Peningkatan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Provinsi Sulawesi Barat;
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang disesuaikan dengan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dari Indikator Kinerja diatas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat berupaya untuk meningkatkan kualitas aparatur melalui pengembangan kompetensi dengan mengikuti diklat, bimtek, workshop, sosialisasi dan seminar. Disamping itu juga diharapkan dengan keterampilan yang telah dimiliki dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga apa yang dicita-citakan dan diharapkan sebagai penyelenggara khususnya bidang Pengembangan SDM dapat terwujud.

### **II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD**

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan

kinerja organisasi dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Disamping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang. Merumuskan perencanaan yang kontekstual dan tepat sasaran senantiasa melekat dan terkait dengan Perangkat Daerah. Oleh karena itu pada bagian ini dikemukakan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan pembinaan dan administrasi pelayanan kepegawaian baik internal maupun eksternal, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan telaahan rencana strategis dari kementerian atau lembaga terkait dengan tugas pokok dan fungsi, sehingga dapat merumuskan isu-isu strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat.

Isu-isu strategis pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat adalah :

1. Belum tersedianya gedung Pusdiklat yang representatif;
2. Jumlah Akreditasi Penyelenggaraan Program Pelatihan yang masih terbatas;
3. Belum terakreditasi dan terstandarisasinya mekanisme / sistem pelaporan data dan informasi Kediklatan di Sulawesi Barat dan masih bersifat sektoral;
4. Belum maksimalnya jumlah tenaga Widyaiswara;
5. Belum memadainya dukungan anggaran BPSDM Provinsi Sulawesi Barat, baik yang bersumber dari APBD maupun dari APBN;
6. Belum tersedianya pedoman dan dokumen penyelenggaraan kegiatan pengembangan SDM yang memadai;
7. Belum maksimalnya fungsi Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) di Provinsi Sulawesi Barat;
8. Belum maksimalnya kompetensi sumber daya manusia bidang Penyelenggaraan Kediklatan di Provinsi Sulawesi Barat;

9. Belum maksimalnya sinergitas Penyelenggaraan Pengembangan SDM antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi di Sulawesi Barat;
10. Pemetaan Pegawai Negeri Sipil yang belum optimal sesuai dengan kompetensinya dan penerapan pelaksanaan uji kompetensi.

Tujuan yang telah dirumuskan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah :

1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Kualitas ASN untuk Penerapan Kepemerintahan yang Baik
2. Meningkatkan Profesionalisme SDM Aparatur

Sasaran yang ingin dicapai dalam manajemen Pengembangan SDM adalah:

1. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sipil Negara;
2. Meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara Lingkup BPSDM;
3. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Meningkatkan kualitas dan kompetensi ASN / Non ASN untuk perwujudan Pemerintahan yang terpercaya; dan
5. Meningkatkan kualitas pelayanan Internal SKPD.

Strategi yang dilakukan untuk mendukung tujuan dan sasaran organisasi adalah:

1. Meningkatkan SDM aparatur sipil negara untuk pengembangan SDM aparatur sipil negara berdasarkan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan fungsional, teknis dan pelatihan manajerial;
2. Meningkatkan kualitas kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui uji kompetensi;
3. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Sipil Negara melalui Pendidikan dan Pelatihan;
4. Rehabilitasi sarana dan prasarana menjadi kantor modern berbasis teknologi untuk menciptakan pelayanan manajemen ASN yang prima serta pengembangan pusat assesment center berbasis teknologi.

Sedangkan kebijakan yang diambil guna mendukung strategi tersebut adalah:

1. Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara melalui pendidikan dan pelatihan teknis;
2. Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara melalui pendidikan dan pelatihan fungsional;
3. Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;
4. Melakukan seleksi terbuka bagi jabatan tinggi Provinsi Sulawesi Barat; dan
5. Peningkatan wawasan aparatur sipil negara melalui sosialisasi, seminar, dan penataran tentang penyelenggaraan kebijakan Aparatur Sipil Negara dalam sistem pemerintahan.

#### **II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh PD Provinsi dalam menyusun rancangan Renja PD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun 1 (satu) tahun.



# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Komplek Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat, Jalan K.H. Abdul Malik Pattana Endeng, Mamuju

No Telp : 0426-2321857 No Faks : 0426-2321857 email : tupgubsulbar@gmail.com

**Tabel T-C.56.**  
**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021**  
**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

Nama Perangkat Daerah : **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>TOTAL</b>				<b>25.683.412.962,93</b>				<b>801.477.707.505,00</b>
<b>4</b>	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>								
<b>4.6</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>				<b>25.683.412.962,93</b>				<b>801.477.707.505,00</b>
4.6.0	Non Program			0.00	0,00			0.00	0,00
4.6.0	Non Program			0.00	0,00			0.00	0,00
4.6.0	Non Program			0.00	4.675.193.976,93			0.00	0,00
4.6.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-		0.00 ORG/BLN	1.739.026.961,00			0.00 ORG/BLN	1.837.541.212,00
4.6.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar		714.00 LEMBAR	415.000.000,00			LEMBAR	437.000.000,00
4.6.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening/Kwitansi		6.00 PAKET	79.000.000,00			PAKET	84.000.000,00
4.6.1.5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah kendaraan yang diasuransikan		9.00 UNIT	31.000.000,00			UNIT	34.000.000,00
4.6.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Perizinan kendaraan dinas/pemeliharaan		34.00 UNIT	133.000.000,00			UNIT	146.000.000,00
4.6.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan Kantor yang diperbaiki		33.00 UNIT	23.000.000,00			UNIT	25.000.000,00
4.6.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor		18.00 PAKET	82.000.000,00			PAKET	90.000.000,00
4.6.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetak dan penggandaan		293.00 BULAN	23.000.000,00	Dana Alokasi Umum		BULAN	25.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.6.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan Kantor		11.00 UNIT	70.000.000,00			UNIT	77.000.000,00
4.6.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Alat Rumah Tangga		20.00 UNIT	5.000.000,00			UNIT	6.000.000,00
4.6.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan		49.00 TERBITAN	26.961,00	Dana Alokasi Umum		TERBITAN	20.541.212,00
4.6.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang ASN / Non ASN		791.00 KOTAK	81.000.000,00			KOTAK	84.000.000,00
4.6.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi di luar Daerah		57.00 LAPORAN	300.000.000,00			LAPORAN	315.000.000,00
4.6.1.20	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi Dalam Daerah		101.00 LAPORAN	340.000.000,00			LAPORAN	345.000.000,00
4.6.1.35	Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi	Jumlah ASN Peserta Rapat		48.00 LAPORAN	145.000.000,00	Dana Alokasi Umum		LAPORAN	135.000.000,00
4.6.1.49	Penataan Arsip OPD	Jumlah Dokumen Arsip		1.00 DOKUMEN	6.000.000,00			DOKUMEN	7.000.000,00
4.6.1.50	Penyediaan Alat Kebersihan Kantor	Jumlah Alat Pembersih		40.00 UNIT	6.000.000,00			UNIT	7.000.000,00
<b>4.6.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>cakupan rumah layak huni yang terjangkau</b>		<b>95.00 UNIT</b>	<b>309.134.473,00</b>			<b>100.00 UNIT</b>	<b>383.444.263,00</b>
4.6.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas		1.00	99.000.000,00	Dana Alokasi Umum			0,00
4.6.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Unit Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		11.00 UNIT	100.134.473,00			UNIT	100.444.263,00
4.6.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah unit Peralatan Gedung Kantor		6.00 UNIT	50.000.000,00			UNIT	100.000.000,00
4.6.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Bangunan yang dipelihara		1.00 UNIT	20.000.000,00			UNIT	20.000.000,00
4.6.2.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara		1.00 UNIT	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum		UNIT	10.000.000,00



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.6.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Rutin /berkala kendaraan Dinas /Operasional yang dipelihara-		40.00 UNIT	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum		UNIT	20.000.000,00
4.6.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Unit Peralatan yang dipelihara		50.00 UNIT	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum		UNIT	10.000.000,00
<b>4.6.3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Jumlah Dokumen dan pengembangan Perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP) Prov Sulbar</b>		<b>1.00</b>	135.733.752,00			<b>1.00</b>	69.483.065,00
4.6.3.4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pasang Pengadaan Pakaian Korpri		60.00	60.000.000,00	Dana Alokasi Umum			0,00
4.6.3.8	Pengadaan Pakaian Olahraga dan Perlengkapannya	Jumlah pasang pakaian olahraga dan perlengkapannya		73.00	75.733.752,00	Dana Alokasi Umum			0,00
<b>4.6.5</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk</b>		<b>180.00</b>	7.000.000.000,00			<b>180.00</b>	8.000.000.000,00
4.6.5.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat		27.00 ORANG	350.000.000,00			ORANG	350.000.000,00
4.6.5.65	Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Pejabat Administrator dan Pejabat Pegawai	Jumlah ASN Peserta Diklat		40.00 ORANG	350.000.000,00	Dana Alokasi Umum		ORANG	400.000.000,00
4.6.5.66	Diklat Tata Naskah Dinas	Jumlah ASN Peserta Diklat		30.00 ORANG	400.000.000,00			ORANG	0,00
4.6.5.67	Diklat Keprotokoleran	Jumlah ASN Pesert Diklat		30.00	450.000.000,00				0,00
4.6.5.68	Diklat Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN Peserta Diklat		30.00 ORANG	261.000.000,00			ORANG	287.000.000,00
4.6.5.69	Diklat Pejabat Pengelola Barang Milik Negara	Jumlah ASN Peserta Diklat		30.00 ORANG	350.000.000,00	Dana Alokasi Umum		ORANG	385.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.6.5.70	Pelatihan Manajemen Mutu Pelayanan Fungsional Keperawatan	Jumlah ASN Peserta Diklat		30.00 ORANG	350.000.000,00			ORANG	0,00
4.6.5.71	Diklat Sertifikasi Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah ASN Peserta Diklat		36.00 ORANG	262.000.000,00	Dana Alokasi Umum		ORANG	250.000.000,00
4.6.5.73	Diklat Penyusunan Renstra / Renja OPD	Jumlah ASN Peserta Diklat		30.00 ORANG	352.000.000,00			ORANG	450.000.000,00
4.6.5.75	Diklat Pengembangan Kapasitas Camat dan Lurah/Kepala Desa	Jumlah ASN Peserta Diklat		40.00 ORANG	303.000.000,00	Dana Alokasi Umum		ORANG	500.000.000,00
4.6.5.77	Diklat Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Jumlah ASN Peserta Diklat		30.00 ORANG	314.000.000,00			ORANG	0,00
4.6.5.78	Diklat Dasar Komputer	Jumlah ASN Peserta Diklat		30.00 ORANG	370.000.000,00			ORANG	407.000.000,00
4.6.5.79	Diklat Pengembangan Kompetensi Penunjang Tupoksi Jabatan	Jumlah ASN Peserta Diklat		30.00 ORANG	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum		ORANG	0,00
4.6.5.88	Diklat Bendahara Keuangan Daerah	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat		33.00 ORANG	350.000.000,00			ORANG	0,00
4.6.5.90	Diklat Pengembangan Teknologi Informasi	Jumlah ASN Peserta Diklat		30.00 ORANG	286.000.000,00			ORANG	0,00
4.6.5.91	Diklat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Jumlah ASN Peserta Diklat		30.00 ORANG	303.000.000,00	Dana Alokasi Umum		ORANG	0,00
4.6.5.92	Diklat Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	Jumlah ASN Peserta Diklat		30.00 ORANG	350.000.000,00	Dana Alokasi Umum		ORANG	385.000.000,00
4.6.5.93	Diklat Panitia Penerima Barang / Jasa	Jumlah ASN Peserta Diklat		30.00 ORANG	350.000.000,00	Dana Alokasi Umum		ORANG	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.6.5.94	Diklat Pejabat Pengelola Barang Milik Negara	Jumlah ASN Peserta Diklat		30.00 ORANG	350.000.000,00	Dana Alokasi Umum		ORANG	385.000.000,00
4.6.5.97	Pelatihan Microsoft Word	Jumlah ASN Peserta Diklat		30.00 ORANG	270.000.000,00			ORANG	0,00
4.6.5.99	Diklat Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Jumlah ASN Peserta Diklat		30.00 ORANG	250.000.000,00			ORANG	0,00
4.6.5.100	Diklat Pengembangan Kompetensi Perangkat Desa dan ASN	Jumlah Peserta		30.00 ORANG	349.000.000,00	Dana Alokasi Umum		ORANG	385.000.000,00
<b>4.6.6</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	-		<b>0.00 ORG/BLN</b>	6.323.800,00			<b>0.00 ORG/BLN</b>	7.354.462,00
		<b>Jumlah Fasilitas Kerjasama Lembaga Pembangunan Daerah</b>	<b>Belum Ada</b>	<b>1.00</b>				<b>1.00</b>	
4.6.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan		4.00	800.000,00	Dana Alokasi Umum			850.000,00
4.6.6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen Laporan		3.00	700.000,00	Dana Alokasi Umum			800.000,00
4.6.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Laporan		1.00	900.000,00	Dana Alokasi Umum			1.300.000,00
4.6.6.5	Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD	Jumlah Dokumen Laporan		3.00	900.000,00				1.300.000,00
4.6.6.6	Penyusunan RKA/DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Laporan		2.00	1.423.800,00	Dana Alokasi Umum			1.304.462,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.6.6.7	Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD	Jumlah Dokumen Laporan		2.00	1.300.000,00	Dana Alokasi Umum			1.300.000,00
4.6.6.14	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban SKPD	Jumlah Dokumen Laporan		1.00	100.000,00				200.000,00
4.6.6.15	Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan Tahunan	Jumlah Dokumen laporan		1.00	100.000,00				100.000,00
4.6.6.17	Penyusunan Standar Operasional Prosedur BPSDM	Jumlah Dokumen SOP		1.00 DOKUMEN	100.000,00	Dana Alokasi Umum		DOKUMEN	200.000,00
<b>4.6.17</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>Jumlah Kemitraan Pemasaran Hasil Pertanian</b>		<b>120.00</b>	11.818.000.000,00			<b>120.00</b>	13.617.000.000,00
4.6.17.17	Diklat Kepemimpinan	Jumlah Peserta		55.00 ORANG	1.990.000.000,00			ORANG	2.284.000.000,00
4.6.17.23	Studi Banding/Magang	Jumlah ASN yang mengikuti magang		20.00	193.000.000,00				0,00
4.6.17.28	Pengembangan Widyaiswara	Jumlah Tenaga Widyaiswara yang mengikuti Diklat		6.00 ORANG	400.000.000,00	Dana Alokasi Umum		ORANG	400.000.000,00
4.6.17.32	Diklat Prajabatan	Jumlah Peserta		100.00 ORANG	1.000.000.000,00			ORANG	1.000.000.000,00
4.6.17.33	Diklat Dasar bagi CPNS	Jumlah Peserta		200.00 ORANG	1.295.000.000,00			ORANG	1.652.000.000,00
4.6.17.34	Diklat TOT Subtansi PIM Tk.IV dan III	Jumlah Peserta		20.00 ORANG	490.000.000,00	Dana Alokasi Umum		ORANG	480.000.000,00
4.6.17.36	Evaluasi Pembelajaran / Pasca Diklat	Jumlah Dokumen		1.00 DOKUMEN	200.000.000,00	Dana Alokasi Umum		DOKUMEN	200.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.6.17.38	Pembangunan Gedung Pusat Pengembangan SDM	JUmlah Gedung		1.00 UNIT	5.000.000.000,00	Dana Alokasi Umum		UNIT	5.000.000.000,00
4.6.17.42	Diklat SP2UPDN	Jumlah ASN Peserta Diklat		30.00 ORANG	250.000.000,00	Dana Alokasi Umum		ORANG	0,00
4.6.17.43	Melaksanakan Uji Kompetensi Bagi ASN	Jumlah ASN Peserta Diklat		30.00 ORANG	200.000.000,00			ORANG	200.000.000,00
4.6.17.46	Monev Pelaksanaan Kediklatan Kabupaten se Sulawesi Barat	Jumlah Dokumen		8.00 DOKUMEN	400.000.000,00	Dana Alokasi Umum		DOKUMEN	0,00
4.6.17.53	Diklat TOT/TOF diklat Pimpemdagri	Jumlah ASN Peserta Diklat		30.00 ORANG	400.000.000,00			ORANG	0,00

## **II.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Pada pelaksanaan Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021, terdapat beberapa usulan program maupun kegiatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan (pokok-pokok pikiran) tetapi yang diakomodir hanya 1 kegiatan yaitu kegiatan Pelatihan LAKIP bagi ASN lingkup Pemprov. Sulawesi Barat. Sedangkan usulan yang lain tidak diakomodir karena bukan kewenangan kami di BPSDM dan tidak ada di dalam Renja, program dan kegiatan yang telah menjadi tugas utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Sebagai salah satu satuan kerja perangkat pemerintah daerah Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022 dan direvisi menjadi Revisi Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022, mencerminkan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022. Secara spesifik program dan kegiatan yang dimuat dalam rencana strategis merupakan upaya untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sinkronisasi antara program dan kegiatan yang dimuat dalam rencana strategis akan memberikan kontribusi dalam pencapaian sasaran dan tujuan

Disisi lain Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022 yang telah direvisi menjadi Revisi Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022, dalam implementasinya tidak dapat dipisahkan dari norma, peraturan perundangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga pembinaan aparatur sipil negara yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat, secara nasional juga memiliki hubungan yang signifikan dengan dokumen Rencana Strategis kementerian/kelembagaan.

Dalam hal ini program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022 yang telah direvisi menjadi Revisi Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022, disinkronisasikan dengan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dari Rencana Strategis Kementerian/Kelembagaan. Telaahan strategis berdasarkan Rencana Strategis terhadap 3 (tiga) kementerian/kelembagaan adalah sebagai berikut :

### **1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia.**

Sebagai lembaga pembina aparatur sipil negara Kementerian PAN-RB Memiliki *visi “Mewujudkan Aparatur Negara Yang Bersih, Kompeten dan Melayani”* dan *misi “Penggerak Utama Reformasi Birokrasi”*. Hal ini dicapaidengan tujuan strategis, yaitu:

- a. Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien;
- b. Terwujudnya sumber daya manusia aparatur yang kompeten dan kompetitif;
- c. Terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan melayani;
- d. Mewujudkan aparatur yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta akuntabel;
- e. Mewujudkan aparatur Kementerian PAN-RB yang profesional dan berkinerja tinggi.

Tujuan strategi ini dicapai dengan strategi percepatan reformasi birokrasi, yaitu:

- a. Penataan struktur birokrasi;
- b. Penataan jumlah, dan distribusi pegawai negeri sipil;
- c. Sistem seleksi calon pegawai negeri sipil dan promosi pegawai negeri sipil secara terbuka
- d. Profesionalisasi pegawai negeri sipil;
- e. Pengembangan sistem elektronik pemerintah (*e-government*)
- f. Peningkatan pelayanan publik;
- g. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur;
- h. Peningkatan kesejahteraan pegawai negeri;



- i. Efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja pegawai negeri sipil.

Paparan diatas memberikan kesimpulan bahwa terdapatnya hubungan yang signifikan antara program Kementerian PAN-RB dengan program Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, yaitu program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program pembinaan dan pengembangan aparatur, program pelayanan administrasi aparatur sipil negara dan program peningkatan kesejahteraan aparatur.

## **2. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia;**

Lembaga Administrasi Negara (LAN), adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. LAN bertugas untuk melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang administrasi negara serta pendidikan dan pelatihan untuk Pegawai Negeri Sipil.

Visi yang ingin diwujudkan LAN adalah ***“Menjadi Institusi Yang Handal Dalam Pengembangan Sistem Administrasi Negara Dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Negara”***.

<sup>3.</sup> Sedangkan misi adalah memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, melalui :

- a. Perumusan kebijakan dalam bidang administrasi negara; Pengkajian, penelitian, dan pengembangan dalam bidang administrasi negara;
- b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;
- c. Pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;
- d. Perkonsultasian dan advokasi dalam bidang administrasi negara;

- e. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi administrasi dan peningkatan kapasitas organisasi LAN.

Dengan mengacu pada rencana strategis LAN diketahui bahwa program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan Aparatur dalam rencana strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat, mempedomani pembinaan pelaksanaan pendidikan aparatur negara yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.

### **3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.**

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang merupakan salah satu unit organisasi dari Kementerian Dalam Negeri, memiliki visi ***“Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Yang Profesional dan Berkesinambungan”*** yang dicapai melalui 7 (tujuh) misi yaitu :

- a. Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan;
- b. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia tenaga kediklatan;
- c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kediklatan;
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
- e. Melakukan reformasi pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. Memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi;
- g. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan telaahan lingkungan strategis dari 3 (tiga) Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga sebagaimana dipaparkan diatas, maka dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan kepegawaian, serta mendukung arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat di bidang aparatur maka isu-isu strategis ditingkat Pemerintah Pusat atau nasional

yang terkait dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat adalah :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- b. Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintah;
- c. Melaksanakan koordinasi dan Sinkronisasi di tingkat pusat dan daerah secara bertahap;
- d. Meningkatkan mutu dan jumlah sarana dan prasarana Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kemajuan teknologi;
- e. Menyusun pedoman pembinaan dan pengembangan aparatur sesuai otonomi daerah menyiapkan peraturan - peraturan maupun petunjuk teknis tentang pembinaan dan pengembangan aparatur;

### **III.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 2021**

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Adapun tujuan yang akan dicapai BPSDM Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kemampuan dan profesionalisme aparatur dalam Pengembangan SDM Aparatur dan Non Aparatur
2. Meningkatkan Kapasitas kelembagaan dan kualitas ASN untuk penerapan pemerintahan yang lebih baik

Sasaran yang ingin dicapai BPSDM Provinsi Sulawesi Barat pada RENJA Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pengelolaan Organisasi Lingkup BPSDM
2. Meningkatnya Kompetensi ASN Provinsi Sulawesi Barat
3. Meningkatnya Standar Kualitas Lembaga BPSDM Provinsi Sulawesi Barat.

### **III.3. Program dan Kegiatan**

Rencana kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat mendefenisikan seluruh Sasaran Strategis, kebijakan, program, dan kegiatan yang diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolak ukur (benchmarks) bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode. Adapun rincian rencana kegiatan perprogram serta indikator Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 sebagai terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2021 Dan Prakiraan Maju Tahun 2022**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						10.033.715.000,00						0,00		
1.	5.04.5-4.0-0.0-0.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH						4.298.000.006,00			Tidak	Ya		0,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			<i>Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai (Persen)</i>				100.00									
			<i>Nilai SAKIP OPD (Poin)</i>				80.00									
			<i>Tingkat Dukungan Mutu Data Sektoral dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkup OPD (Skala Likert)</i>				3.00									
			<i>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD (Persen)</i>				100.00									
	5.04.5-4.0-0.0-0.01.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						185.000.000,00			Tidak	Ya		-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			<i>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup BPSDM (Poin)</i>				1.00						0.00			
			<i>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup BPSDM (Poin)</i>				1.00						0.00			
			<i>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup BPSDM (Poin)</i>				1.00						0.00			
			<i>Nilai Evaluasi Internal Lingkup BPSDM (Poin)</i>				1.00						0.00			
			<i>Persentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup OPD (Poin)</i>				1.00						0.00			

	<i>Nilai Capaian Kinerja Lingkup BPSDM (Poin)</i>				1.00							0.00	
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah						7.000.000,00						-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan (Dokumen)</i>				2.00								
	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan (Dokumen)</i>				2	7.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)						
Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan						7.000.000,00						-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (D)</i>				3.00								
	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>				2	7.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)						
Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah						14.000.000,00						-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	<i>Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen)</i>				2.00								
	<i>Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen)</i>				2	7.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)						
	<i>Jumlah Data Sektoral yang Tersedia (Dokumen)</i>				3.00								
	<i>Jumlah Data Sektoral yang Tersedia (Dokumen)</i>				2	7.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)						
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah						150.000.000,00						-	Badan Pengembangan Sumber

		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			1.00									Daya Manusia
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			1	150.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)							
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					7.000.000,00							-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja (Poin)			1.00									
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja (Pain)			1	7.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)							
5.04.5-4.0-0.0-0.01.01.1.02	Administrasi Keuangan					86.000.000,00			Tidak	Ya			-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD (Persen)			1.00						0.00			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					1.000.000,00							-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya (Orang)			45.00									
		Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya (orang)			45	1.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)							
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					10.000.000,00							-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Disediakan			45.00									

	(Persen) Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Disediakan (Persen)			45	10.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)								
Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi					4.000.000,00								-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Jumlah Laporan Konsolidasi Keuangan (Laporan)			4.00										
	Jumlah Laporan Konsolidasi Keuangan (Laporan)			4	4.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)								
Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan					5.000.000,00								-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Keuangan Bulanan (Laporan)			4.00										
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Keuangan Bulanan (Laporan)			1	5.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)								
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					5.000.000,00								-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Dikelola dan Disiapkan (Laporan)			100.00										
	Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Dikelola dan Disiapkan (Laporan)			1	5.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)								
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					40.000.000,00								-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi			2.00										



			<i>Kinerja SKPD yang Tersusun (Laporan)</i> <i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun (Laporan)</i>				1	40.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)							
	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran							10.000.000,00						-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang Tersusun (Laporan)</i>				14,00									
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang Tersusun (Laporan)</i>				14	10.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)							
	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran							5.000.000,00						-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			<i>Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran (Laporan)</i>				1,00									
			<i>Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran (Laporan)</i>				1	5.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)							
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun							6.000.000,00						-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir yang Tersusun (Laporan)</i>				1,00									
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir yang Tersusun (Laporan)</i>				1	6.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)							
5.04.5-4.0-0.0-0.01.01.1.03	Administrasi Umum							3.352.000.000,00			Tidak	Ya		-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

					100.00							0.00		
	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup BPSDM (Persen)													
Penyediaan Jasa Surat Menyurat						450.000.000,00							-	Badan Pengembang an Sumber Daya Manusia
	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola (Persen)				100.00									
	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola (Persen)				100	450.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)							
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						250.000.000,00							-	Badan Pengembang an Sumber Daya Manusia
	Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan (Rekening)				5.00									
	Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan (Rekening)				5	250.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)							
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100.000.000,00							-	Badan Pengembang an Sumber Daya Manusia
	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Menggunakan Jasa/Pihak Ketiga (Unit)				15.00									
	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Menggunakan Jasa/Pihak Ketiga (Unit)				15	100.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)							
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah						50.000.000,00							-	Badan Pengembang an Sumber Daya Manusia
	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diasuransikan (Unit)				6.00									

					6	50.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)															
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						340.000.000,00													-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
					35.00																	
					35	300.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)															
					35.00																	
					35	40.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)															
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						10.000.000,00														-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
					12.00																	
					12	10.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)															
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						2.000.000,00															-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					12.00																	
					12	2.000.000,00	(Sulawesi Barat,															

	<i>yang Menggunakan Jasa/Pihak Ketiga (Bulan)</i>					SULAWE SI BARAT)							
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja					40.000.000,00							-	Badan Pengembang an Sumber Daya Manusia
	<i>Jumlah Peralatan Kerja yang Mendapatkan Jasa Perbaikan (Unit)</i>			36.00									
	<i>Jumlah Peralatan Kerja yang Mendapatkan Jasa Perbaikan (Unit)</i>			36	40.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)							
Penyediaan Alat Tulis Kantor					90.000.000,00							-	Badan Pengembang an Sumber Daya Manusia
	<i>Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan (Jenis)</i>			12.00									
	<i>Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan (Jenis)</i>			12	90.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)							
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					190.000.000,00							-	Badan Pengembang an Sumber Daya Manusia
	<i>Jumlah Barang yang Dicitak (Buah)</i>			100.00									
	<i>Jumlah Barang yang Dicitak (Buah)</i>			100	90.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)							
	<i>Jumlah Barang yang Digandakan (Buah)</i>			200.00									
	<i>Jumlah Barang yang Digandakan (Buah)</i>			200	100.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)							
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					100.000.000,00							-	Badan Pengembang an Sumber Daya Manusia
	<i>Jumlah Jenis</i>			20.00									

	<i>Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Jenis)</i>				20	100.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)								
	<i>Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Jenis)</i>														
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100.000.000,00								-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	<i>Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang Disediakan (Jenis)</i>				15.00										
	<i>jumlah Jenis Peralatan Kantor yang Disediakan (Unit)</i>				10	100.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)								
	<i>Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Jenis)</i>				15.00										
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						10.000.000,00								-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	<i>Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Jenis)</i>				20.00										
	<i>Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Jenis)</i>				10	10.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)								
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						100.000.000,00								-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	<i>Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang Disediakan (Jenis)</i>				20.00										
	<i>Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang Disediakan (Jenis)</i>				20	50.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)								
	<i>Jumlah Jenis Bahan Peraturan Perundang-</i>				20.00										

	<i>undangan yang Disediakan (Jenis)</i>																					
	<i>Jumlah Jenis Bahan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Jenis)</i>				20	50.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)															
Penyediaan Bahan Logistik Kantor						50.000.000,00														-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	<i>Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Jenis)</i>				15.00																	
	<i>Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Jenis)</i>				15	50.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)															
Penyediaan Makanan dan Minuman						130.000.000,00															-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	<i>Jumlah Jenis Makanan yang Disediakan (Jenis)</i>				800.00																	
	<i>Jumlah Jenis Makanan yang Disediakan (Jenis)</i>				800	100.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)															
	<i>Jumlah Jenis Minuman yang Disediakan (Jenis)</i>				800.00																	
	<i>Jumlah Jenis Minuman yang Disediakan (Jenis)</i>				800	30.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)															
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						300.000.000,00															-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	<i>Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi Ke Luar Daerah (Laporan)</i>				61.00																	
	<i>Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi</i>				50	300.000.000,00	(Luar Sulawesi Barat,															



		(Jenis)						BARAT)					-	Badan Pengembang an Sumber Daya Manusia
		Pengadaan Mebeleur					100.000.000,00							
			Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan (Jenis)		100.00									
			Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan (Unit)		100		100.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)						
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan					40.000.000,00						-	Badan Pengembang an Sumber Daya Manusia
			Jumlah Jenis Pemeliharaan Mobil Jabatan (Jenis)		1.00									
			Jumlah Jenis Pemeliharaan Mobil Jabatan (Unit)		1		40.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)						
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional					300.000.000,00						-	Badan Pengembang an Sumber Daya Manusia
			Jumlah Jenis Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional (Jenis)		35.00									
			Jumlah Jenis Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)		35		300.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)						
5.04.5-4.0-0.0-0.01.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						675.000.006,00			Tidak	Ya		-	Badan Pengembang an Sumber Daya Manusia
			Tingkat Disiplin Aparatur Lingkup BPSDM (Persen)		100.00							0.00		
		Pengadaan Mesin/Kartu Absensi					30.000.000,00						-	Badan Pengembang an Sumber Daya Manusia



	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang Diadakan (Unit)			1.00																
	umlah Mesin/Kartu Absensi yang Diadakan (Unit)			1	30.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)														
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan (Pasang)			75.00														-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan (Pasang)			75	65.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)														
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang Diadakan (Pasang)			75.00															-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang Diadakan (Pasang)			75	65.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)														
Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah Pakaian Korpri yang Diadakan (Pasang)			50.00															-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Jumlah Pakaian Korpri yang Diadakan (Pasang)			50	6,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)														
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus yang Diadakan (Pasang)			75.00															-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

			Jumlah Pakaian Khusus yang Diadakan (Pasang)			75	65.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)											
		Pendidikan dan Pelatihan Formal					250.000.000,00										-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (Orang)			27.00													
			Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (orang)			27	250.000.000,00	(Luar Sulawesi Barat, Luar Wilayah)											
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					100.000.000,00											-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Persentase Keikutsertaan pada Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Orang)			100.00													
			Persentase Keikutsertaan pada Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (orang)			50	100.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)											
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					100.000.000,00											-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Orang)			100.00													
			Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (orang)			50	100.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)											
2.	5.04.5-4.0-0.0-0.01.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					5.735.714.994,00				Ya	Ya					0,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Persentase ASN yang Mengikuti			12.00													



					1	50.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)												
					1.00														
					1	50.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)												
	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					200.000.000,00												-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					1.00														
					1	50.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)												

Jumlah Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum dan Pilihan bagi jabatan administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan urusan Pemerintahan Umum (Dokumen)				1.00			
Jumlah Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum dan Pilihan bagi jabatan administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan urusan Pemerintahan Umum (Dokumen)				1	50.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)	
Jumlah Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Inti bagi jabatan administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, dan urusan Pemerintahan Umum (Dokumen)				1.00			
Jumlah Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Inti bagi jabatan administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, dan urusan Pemerintahan Umum (Dokumen)				1	50.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)	
Jumlah Penyusunan				1.00			

	Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Inti bagi jabatan administrasi Perangkat Daerah Penunjang (Dokumen)				1	50.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)								
	Jumlah Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Inti bagi jabatan administrasi Perangkat Daerah Penunjang (Dokumen)														
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						800.000.000,00								-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan bagi jabatan administrasi (Orang)				40.00										
	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan bagi jabatan administrasi (orang)				40	200.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)								
	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Pilihan bagi jabatan administrasi (Orang)				40.00										
	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Pilihan bagi jabatan administrasi (orang)				40	200.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)								
	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan				80.00										







								BARAT)							
		<i>Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Inti bagi jabatan administrasi Perangkat Daerah Penunjang (kegiatan)</i>													
5.04.5-4.0-0.0-0.01.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						3.985.714.994,00			Ya	Ya			-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		<i>Jumlah Peserta Sertifikasi Kompetensi bagi ASN (Orang)</i>				2.00							0.00		
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional						300.000.000,00							-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		<i>Jumlah Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi (Dokumen)</i>				1.00									
		<i>Jumlah Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi (Dokumen)</i>				1	50.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)							
		<i>Jumlah Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi (Dokumen)</i>				1.00									
		<i>Jumlah Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi (Dokumen)</i>				1	50.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)							

(Dokumen)				1.00			
Jumlah Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengelolaan Sumber Belajar serta Kerjasama, (Dokumen)				1	50.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)	
Jumlah Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, (Dokumen)				1.00			
Jumlah Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, (Dokumen)				1	50.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)	
Jumlah Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Prajabatan (Dokumen)				1.00			
Jumlah Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Prajabatan (Dokumen)				1	50.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)	
Jumlah Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional. (Dokumen)				1.00			
Jumlah Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana				1	50.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)	



	Jumlah Dokumen hasil Penelitian/Pengembangan (Dokumen)				1.00														Manusia	
	Jumlah Dokumen hasil Penelitian/Pengembangan (Dokumen)				1	200.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)													
Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional						400.000.000,00													-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Jumlah Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi (Dokumen)				1.00															
	Jumlah Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi (Dokumen)				1	200.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)													
	Jumlah Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Jabatan Fungsional (Dokumen)				1.00															
	Jumlah Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Jabatan Fungsional (Dokumen)				1	200.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)													
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan						1.760.714.994,00													-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,				20.00															



fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi (Kegiatan)							
Jumlah Pembinaan, Pengoordinasian, fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi (kegiatan)				1	100.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)	
Jumlah Pembinaan, Pengoordinasian, fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi (Kegiatan)				1.00			
Jumlah Pembinaan, Pengoordinasian, fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi (kegiatan)				1	100.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)	
Jumlah Pembinaan, Pengoordinasian, fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama, (Kegiatan)				1.00			
Jumlah Pembinaan, Pengoordinasian, fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama, (kegiatan)				1	100.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)	
Jumlah Pembinaan, Pengoordinasian, fasilitasi, Pemantauan,				1.00			

			<i>Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi, (Kegiatan)</i>											
			<i>Jumlah Pembinaan, Pengoordinasian, fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi, (kegiatan)</i>			1	100.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)						
			<i>Jumlah Pembinaan, Pengoordinasian, fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan (Kegiatan)</i>			1.00								
			<i>Jumlah Pembinaan, Pengoordinasian, fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan (kegiatan)</i>			1	100.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)						
<b>J U M L A H</b>								<b>10.033.715.000,00</b>						

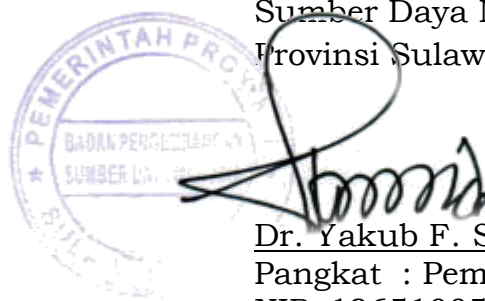
## BAB IV

### PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 menjadi sangat penting artinya untuk menjadi acuan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai dokumen perencanaan, dokumen ini mengikat secara kelembagaan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2021 yang tidak terlepas dari dokumen Renstra, RKPD, RPJMD dan RPJPD. Secara kontinyu dokumen ini juga menjadi acuan dalam dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Kepala Badan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia  
Provinsi Sulawesi Barat,

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat. The stamp contains the text 'PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT' around the top edge, 'BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA' in the center, and 'SULAWESI BARAT' at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Dr. Yakub F. Solon, SH, M.Pd  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP. 19651005 198812 1 002